

Manual Indikator Kinerja Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim

Sasaran Kegiatan

SS. 1 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Hilirisasi Sumber Daya Maritim Yang Berkualitas

Deskripsi SP

Deskripsi Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Hilirisasi Sumber Daya Maritim Yang Berkualitas adalah sebuah kondisi dimana rumusan kebijakan yang dihasilkan merupakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan publik yang telah mencapai target kinerja. Hilirisasi sumber daya maritim merupakan salah satu agenda penting pemerintah untuk memberikan nilai tambah pada produk sumber daya maritim. Urgensi pemerintah dalam melaksanakan agenda hilirisasi sumber daya maritim dituangkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam mendukung hilirisasi sumber daya maritim, saat ini akan diprioritaskan tiga isu yang akan dijadikan prioritas untuk dikawal, yaitu kebijakan percepatan pembangunan industri perikanan nasional, kebijakan pengembangan industri perikanan dan jaminan usahanya, kebijakan pemanfaatan riset pada sektor kemaritiman, serta kebijakan pelaksanaan kerja sama eksplorasi laut, edukasi publik dan pengembangan kapasitas sumber daya maritim.

Indikator Kinerja

Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Hilirisasi Sumber Daya Maritim ditindaklanjuti

Deskripsi Indikator Kinerja :

Definisi:

Terdapat 4 Rumusan Kebijakan pada indikator kebijakan Persentase Rumusan Kebijakan Di Bidang Hilirisasi Sumber Daya Maritim Yang Ditindaklanjuti dan berikut adalah deskripsi dari masing-masing rumusan kebijakan tersebut:

1. Deskripsi Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Industri Pergaraman Nasional

Sebuah kondisi dimana rumusan kebijakan yang dihasilkan terdiri atas serangkaian kegiatan pengendalian kebijakan percepatan pembangunan industri perikanan nasional. Komponen ini akan fokus pada melakukan pengendalian implementasi kebijakan percepatan pembangunan industri perikanan nasional yang tertuang pada Perpres 126 tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Selain itu, juga akan dilakukan serangkaian aktivitas evaluasi kebijakan pembangunan perikanan nasional. Diharapkan dari evaluasi ini akan ditemukan potensi perbaikan-perbaikan yang dapat menyempurnakan Perpres 126 tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional

2. Deskripsi Rumusan Kebijakan Pengembangan Industri Perikanan dan Jaminan Usahanya

Sebuah kondisi dimana rumusan kebijakan yang dihasilkan terdiri atas serangkaian kegiatan pengendalian kebijakan pengembangan industri perikanan dan jaminan usahanya. Komponen ini akan melakukan agenda hilirisasi rumput laut. Sebagai salah satu komoditas sumber daya maritim, rumput laut di Indonesia memiliki potensi yang cukup besar jika dapat dikembangkan dengan baik. Hilirisasi rumput laut bermaksud untuk memberikan nilai tambah pada hasil produksi rumput laut melalui serangkaian aktivitas perbaikan tata kelola terkait pengolahan rumput laut dan pemanfaatannya. Dengan adanya aktivitas-aktivitas tersebut diharapkan terdapat tata kelola yang baik dan mampu memberikan jaminan usaha bagi para pelaku industri yang berkomitmen melakukan pengembangan hilirisasi sumber daya maritim

3. Deskripsi Rumusan Kebijakan Pemanfaatan Riset pada Sektor Kemaritiman

Sebuah kondisi dimana rumusan kebijakan yang dihasilkan terdiri atas serangkaian kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemanfaatan riset pada sektor kemaritiman. Komponen ini akan melakukan serangkaian kegiatan formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan riset dan kerjasama dalam penguatan sumber daya maritim. Kegiatan kerjasama riset akan diprioritaskan untuk menemukan potensi sumber daya kelautan. Saat ini terdapat dua riset yang akan dikawal, yaitu riset dari aktivitas kerjasama dengan korea dan riset kerjasama yang dilakukan dengan RRT. Riset kerjasama dengan Korea akan fokus pada penyusunan pengembangan pusat pelatihan teknologi maritim terintegrasi. Dari pusat pelatihan ini diharapkan menjadi wahana pelatihan dan riset kelautan dan perikanan bagi mahasiswa, akademisi, peneliti dan pemerintahan. Riset kerjasama yang dilakukan bersama RRT akan fokus pada penelitian genomik kelautan

4. Deskripsi Rumusan Kebijakan Pelaksanaan Kerja Sama Eksplorasi Laut, Edukasi Publik dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Maritim

Sebuah kondisi dimana rumusan kebijakan yang dihasilkan terdiri atas serangkaian kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan kerja sama eksplorasi laut, edukasi publik dan pengembangan kapasitas sumber daya maritim. Komponen ini akan fokus pada implementasi dan evaluasi kebijakan dalam hal kerjasama eksplorasi laut, edukasi publik dan pengembangan kapasitas sumber daya maritim antara Indonesia dengan mitra luar negeri. Tahun ini akan dilakukan eksplorasi laut, edukasi publik dan pengembangan kapasitas dengan melibatkan para akademisi, praktisi, lembaga pemerintahan dan pelajar. Kegiatan yang dilakukan antara lain kegiatan *young explorer programme* dan *floating school, university lecture tours* serta kedatangan kapal Ocean Xplorer

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah Kertas Kerja Kebijakan yang ditindaklanjuti (4)}}{\text{Jumlah Kertas Kerja Kebijakan yang dihasilkan (4)}} \times 100\%$$

Tujuan:

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi, pengendalian, dan implementasi kebijakan terkait hilirisasi sumber daya maritim

Satuan Pengukuran : Persentase

Unit Penanggung jawab : Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim

Unit/Pihak Penyedia Data : **Unit/Pihak Penyedia Data terkait Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Industri Pergaraman Nasional**

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Kementerian Perindustrian
4. Kementerian Perdagangan
5. Kementerian Koperasi dan UKM
6. Kementerian BUMN
7. Kementerian PUPR
8. Kementerian Hukum dan HAM
9. Kementerian Dalam Negeri
10. Kementerian PPN/BAPPENAS
11. BPOM
12. BRIN
13. Badan Pusat Statistik
14. Badan Standardisasi Nasional
15. Pemerintah Daerah lokasi Sentra Ekonomi Garam Rakyat
16. dan Kementerian/Lembaga teknis terkait lainnya

Unit/Pihak Penyedia Data terkait Rumusan Kebijakan Pengembangan Industri Perikanan dan Jaminan Usahanya

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Kementerian PPN/BAPPENAS
4. Kementerian Perindustrian
5. Kementerian Perdagangan
6. Kementerian Koperasi dan UKM
7. Kementerian BUMN
8. Kementerian Pertanian
9. BPOM
10. BRIN
11. Badan Standardisasi Nasional
12. Pemerintah Daerah
13. dan Kementerian/Lembaga teknis terkait lainnya

Unit/Pihak Penyedia Data terkait Rumusan Kebijakan Pemanfaatan Riset pada Sektor Kemaritiman

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Kementerian PPN/BAPPENAS
4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
5. BRIN
6. Badan Informasi dan Geospasial
7. BMKG
8. Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut
9. Pemerintah Daerah
10. Perguruan Tinggi
11. dan Kementerian/Lembaga teknis terkait lainnya

Unit/Pihak Penyedia Data terkait Rumusan Kebijakan Pemanfaatan Riset pada Sektor Kemaritiman

1. Kementerian PPN/BAPPENAS
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
4. BRIN
5. BMKG
6. Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut
7. Kementerian ESDM
8. Perguruan Tinggi
9. dan Kementerian/Lembaga teknis terkait lainnya

Sumber Data terkait Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Industri Pergaraman Nasional

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Kementerian Perindustrian
4. Kementerian Perdagangan
5. Kementerian Koperasi dan UKM
6. Kementerian BUMN
7. Kementerian PUPR
8. Kementerian Hukum dan HAM
9. Kementerian Dalam Negeri
10. Kementerian PPN/BAPPENAS
11. BPOM
12. BRIN
13. Badan Pusat Statistik
14. Badan Standardisasi Nasional
15. Pemerintah Daerah lokasi Sentra Ekonomi Garam Rakyat
16. dan Kementerian/Lembaga teknis terkait lainnya

Sumber Data terkait Rumusan Kebijakan Pengembangan Industri Perikanan dan Jaminan Usahanya

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Sumber Data

:

2. Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Kementerian PPN/BAPPENAS
4. Kementerian Perindustrian
5. Kementerian Perdagangan
6. Kementerian Koperasi dan UKM
7. Kementerian BUMN
8. Kementerian Pertanian
9. BPOM
10. BRIN
11. Badan Standardisasi Nasional
12. Pemerintah Daerah
13. dan Kementerian/Lembaga teknis terkait lainnya

Sumber Data terkait Rumusan Kebijakan Pemanfaatan Riset pada Sektor Kemaritiman

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Kementerian PPN/BAPPENAS
4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
5. BRIN
6. Badan Informasi dan Geospasial
7. BMKG
8. Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut
9. Pemerintah Daerah
10. Perguruan Tinggi
11. dan Kementerian/Lembaga teknis terkait lainnya

Sumber Data terkait Rumusan Kebijakan Pemanfaatan Riset pada Sektor Kemaritiman

1. Kementerian PPN/BAPPENAS
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
4. BRIN
5. BMKG
6. Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut
7. Kementerian ESDM
8. Perguruan Tinggi
9. dan Kementerian/Lembaga teknis terkait lainnya

Jenis Konsolidasi Periode : Sum Average Take last

Jenis Konsolidasi Lokasi : Sum Average Raw Data

Polarisasi Indikator Kinerja : Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan : Triwulan Semesteran Tahunan

| Periode Pelaporan | 2023 | | 2024 |
|-------------------|--------|-----------|--------|
| | Target | Realisasi | Target |
| TRIWULAN 1 | | | |
| TRIWULAN 2 | | | |
| TRIWULAN 3 | | | |
| TRIWULAN 4 | 100% | 100% | 100% |

Asisten Deputi Hilirisasi
Sumber Daya Maritim



Manual Indikator Kinerja Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim

| | |
|------------------------------------|--|
| Sasaran Program (SP) | SS. 1 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Hilirisasi Sumber Daya Maritim Yang Berkualitas |
| Deskripsi SP | Deskripsi Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Hilirisasi Sumber Daya Maritim Yang Berkualitas adalah Sebuah kondisi pencapaian isu strategis dalam rangka pelaksanaan kerja sama eksplorasi laut, edukasi publik dan pengembangan kapasitas sumber daya maritim. Komponen ini akan fokus pada pelaksanaan kegiatan <i>young explorer programme</i> dan <i>floating school</i> serta kedatangan kapal OceanXplorer |
| Indikator Kinerja | : Persentase isu-isu strategis yang diselesaikan |
| Deskripsi Indikator Kinerja | <p>Definisi: Terdapat 1 Isu Strategis pada indikator kebijakan Persentase isu-isu strategis yang diselesaikan dan berikut adalah deskripsi dari masing-masing isu-isu tersebut:</p> <p>1. Deskripsi Koordinasi Kerja Sama Eksplorasi Laut Dalam Sebuah kondisi dimana terlaksananya kegiatan <i>young explorer programme</i> dan <i>floating school, university lecture tours</i> serta persiapan administrasi dan teknis kedatangan kapal Ocean Xplorer</p> <p>Formula:</p> $\frac{\text{Jumlah Isu Strategis yang diselesaikan (1)}}{\text{Jumlah Isu Strategis yang ditugaskan (1)}} \times 100\%$ <p>Tujuan: Untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelesaian isu strategis.</p> |
| Satuan Pengukuran | : Persentase |
| Unit Penanggung jawab | : Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim |
| Unit/Pihak Penyedia Data | <p>Unit/Pihak Penyedia Data terkait Koordinasi Kerja Sama Eksplorasi Laut Dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian PPN/BAPPENAS 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan 3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 4. BRIN 5. BMKG 6. Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut 7. Kementerian ESDM 8. Perguruan Tinggi 9. dan Kementerian/Lembaga teknis terkait lainnya |
| Sumber Data | <p>Sumber Data terkait Koordinasi Kerja Sama Eksplorasi Laut Dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian PPN/BAPPENAS 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan 3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 4. BRIN 5. BMKG 6. Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut 7. Kementerian ESDM |

8. Perguruan Tinggi
9. dan Kementerian/Lembaga teknis terkait lainnya

Jenis Konsolidasi Periode : Sum Average Take last

Jenis Konsolidasi Lokasi : Sum Average Raw Data

Polarisasi Indikator Kinerja : Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan : Triwulan Semesteran Tahunan

| Periode Pelaporan | 2023 | | 2024 |
|-------------------|--------|-----------|--------|
| | Target | Realisasi | Target |
| TRIWULAN 1 | | | |
| TRIWULAN 2 | | | |
| TRIWULAN 3 | | | |
| TRIWULAN 4 | 100% | 100% | 100% |

Asisten Deputi Hilirisasi
Sumber Daya Maritim



Ir. Amalyos, M.M

